IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(Studi Kasus di SMA Negeri 1 Boyolali)

Nama : Isna Safariyanto

Pembimbing : 1. Dewi Rostyaningsih

2. Landjar Kurniawan

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

STUDI IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI SMAN 1 BOYOLALI)

Abstrak

Masih terlihat banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi terutama yang dilakukan oleh para pelajar menjadi latar belakang penelitian ini. Masalah yang muncul: Apakah ada hubungan positif antara variable komunikasi dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali? Apakah ada hubungan positif antara sikap implementor dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali? Apakah ada hubungan positif antara komunikasi dan sikap implementor dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali?

Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan komunikasi dan sikap dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali.

Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan analisis data menggunakan uji korelasi rank kendall, konkordasi kendall, dan determinasi melalui program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan sikap implementor secara parsial memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali. Secara simultan (bersama-sama) komunikasi dan sikap implementor memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali.

Disarankan agar dapat meningkatkan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali. Dalam hal komunikasi, pelaksana haruslah Memperbanyak frekuensi sosialisasi ketertiban berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat pada umumnya. Agar kesadaran tertib berlalu lintas semakin tinggi serta lebih mempererat jalinan hubungan kerja sama yang baik antara aparat polisi dengan masyarakat di sekitarnya guna membangun rasa kekeluargaan serta menghilangkan rasa ketidakpercayaan. Sedangkan untuk variable sikap, Meningkatkan pengawasan terhadap tindak pelanggaran lalu lintas dengan secara continue mengadakan operasi ketertiban lalu lintas serta menindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar implementasi undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak diremehkan oleh masyarakat serta menindak tegas kepada para oknum-oknum polisi yang telah melakukan pelanggaran, khususnya praktek KKN dalam penilangan yang semakin lama dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat.

Key Words: UU No. 22 Tahun 2009, Komunikasi, Sikap Implementor

STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF UU NOMOR 22 TAHUN 2009 ON THE ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION (CASE STUDY IN SMAN 1 BOYOLALI)

Abstract

It still looks much traffic violations that occur mainly done by the students into the background of this research. Problems that arise: Is there a positive relationship between communication variables to the implementation of UU no. 22 Tahun 2009 in the SMAN 1 Boyolali? Is there a positive relationship between implementor attitudes to the implementation of UU No. 22 Tahun 2009 in the SMAN 1 Boyolali? Is there a positive relationship between communication and implementor attitudes to the implementation of UU no. 22 Tahun 2009 in the SMAN 1 Boyolali?

Purpose of the study to determine the relationship of communication and attitudes to the implementation of UU no. 22 Tahun 2009 in the SMAN 1 Boyolali.

Efforts to address real issues and research conducted with the purpose of data analysis using rank kendall correlation test, kendall konkordasi, and determination through the SPSS program.

Results showed that communication and implementor attitudes partially has a positive and significant relationship with the implementation of UU no. 22 Tahun 2009 in the SMAN 1 Boyolali. Simultaneously (together) communication and implementor attitudes have a positive and significant relationship with the implementation of UU no. 22 Tahun 2009 in the SMAN 1 Boyolali.

It is recommended to improve the implementation of UU no. 22 Tahun 2009 in SMAN 1. In terms of communication, socialization executive order must Increase the frequency of traffic to the students and the community at large. That public awareness of traffic rules and not going higher. As for the attitude variable, Improving the monitoring of traffic violations continue to conduct operations in the traffic order and crack down on violations that occur to the implementation of the law can be implemented properly and not to be underestimated by the public and to crack down on rogue police officers who have committed abuses, particularly corrupt practices that the longer considered a matter of course by the community.

Key Words: UU No. 22 Tahun 2009, Communication, Implementor Attitude

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem transportasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lalu lintas jalan. Pada dasarnya transportasi menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pembinaan di bidang lalu lintas jalan.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas yang ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan diperlukan penetapan aturanaturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pemerintah mengganti UU No 14 Tahun 1992 dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan dan sasarannya adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Saat ini bidang lalu lintas menjadi suatu permasalahan yang semakin rumit bagi pihak kepolisian. Hal ini disebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor sangat tinggi dan tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Sehingga memaksa pihak kepolisian berupaya keras untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas yang sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009.

B. PERUMUSAN MASALAH

Apakah ada hubungan tingkat komunikasi dan sikap dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Untuk mendeskripsikan implementasi, tingkat komunikasi terhadap implementasi, dan sikap implementor terhadap implementasi UU Nomor

- 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat komunikasi terhadap implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sikap implementor terhadap implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali.
- d. Untuk mengetahui pengaruh tingkat komunikasi dan sikap terhadap implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali.

D. KERANGKA TEORI

Implementasi Kebijakan (Y)

Van Meter dan Van Horn (dalam Riant Nugroho, 2003: 167-168) membuat gambaran mengenai hubungan faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan/kinerja kebijakan. Adapun variabel yang menentukan faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik,
- d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Selain itu, ada beberapa faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III (dalam Budi Winarno, 2003: 174) yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi (sikap implementor)
- d. Struktur birokrasi

Pada prinsipnya ada "empat tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan yaitu (Riant Nugroho, 2003: 179-182):

- a. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat.
 - 1. Ketertiban Lalu Lintas
 - 2. Keselamatan Lalu Lintas
 - 3. Keamanan Lalu Lintas
 - 4. Kelancaran Lalu Lintas
 - 5. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Tepat pelaksananya.
- c. Tepat target.
- d. Tepat lingkungan.

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan UU Nomor 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali dengan melihat bagaimanakah komunikasi yang berlangsung antara pihak Satuan Polisi Lalu Lintas dengan para pelajar serta bagaimanakah sikap implementor

dalam mengimplementasikan UU Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga apakah kebijakan yang dilakukan telah mencapai tujuan yaitu tertib berlalu lintas.

Komunikasi (X1)

Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dari aparat pemerintah (Polisi Lalu Lintas) kepada masyarakat khususnya pelajar SMA Negeri 1 Boyolali untuk kelancaran dan keberhasilan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009.

Tujuan komunikasi adalah memberikan keterangan tentang sesuatu kepada penerima, mempengaruhi sikap penerima, memberikan dukungan psikologis kepada penerima atau mempengaruhi perilaku penerima (Kenneth N. Wexly dan Gary A. Yuki, 2003: 71).

Menurut Steward L Tubbs dan Sylvia Moss ada beberapa indikator komunikasi agar bisa dikatakan efektif, yaitu:

- a. Pengertian
- b. Kesenanngan
- c. Mempengaruhi sikap
- d. Hubungan sosial yang baik
- e. Tindakan

Sikap (X2)

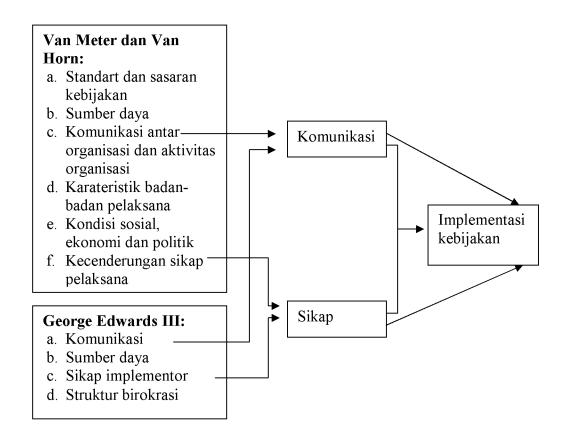
Sikap adalah suatu bentuk aktivitas akal dan pikiran dari aparat kepolisian yang ditujukan kepada para pelajar dalam mengimplementasikan UU Nomor 22 Tahun 2009 agar tercipta suasana tertib berlalu lintas dikalangan pelajar.

Terdapat tiga komponen mengenai sikap, yaitu (J. Winardi, 2004:

213):

- a. Afeksi
- b. Kognisi
- c. Perilaku

Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan UU Nomor 22 Tahun 2009



E. HIPOTESIS

Hipotesis Minor

- a. Ada hubungan positif antara komunikasi dengan implementasi UU Nomor
 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali.
- b. Ada hubungan positif antara sikap dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali.

Hipotesis Mayor

"Ada hubungan positif antara komunikasi dan sikap dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Boyolali."

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian penjelasan (eksplanatori) yaitu memfokuskan hubungan dan pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya untuk menguji hipotesis.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar SMA Negeri 1 Boyolali yang menggunakan sepeda motor pada saat pergi ke sekolah yaitu sebesar 473 siswa.

Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara proporsional sampling, yaitu sampel diambil dari siswa kelas tiga yang mana merupakan usia yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM. Dari 8 kelas di SMAN 1 Boyolali berdasarkan jam pelajaran BK (Bimbingan Konseling) yang ditentukan oleh guru BK, dipilih 4 kelas dengan jumlah siswa 120 orang. Kemudian diambil 83 orang sebagai sampel berdasarkan nomor urut yang paling awal.

3. Sumber Data

Sumber Data Primer

Adalah data-data yang secara langsung diambil atau didapat dari sampel dengan menggunakan daftar kuesioner (83 orang), wawancara (10 orang yang diambil secara random) serta observasi langsung.

Sumber Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari literatur-literatur, majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang didapat dari kantor SAMSAT Boyolali, SMAN 1 Boyolali dan dari internet serta data tidak langsung dari objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi lapangan digunakan untuk melihat dan mencatat secara langsung dan sistematis terhadap objek penelitian yaitu para siswa dan keadaan lingkungan SMAN 1 Boyolali.

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data melalui tanya jawab langsung terhadap siswa, guru, dan aparat kepolisian yang sengaja dipilih dengan maksud agar memberikan informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun tertulis dan sistematis sebanyak 120 kuesioner yang kemudian dipilih menjadi 83 kuesioner.

Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan dan penelaahan terhadap catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

5. Skala Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, terhadap semua jawaban yang masuk dari seluruh responden, peneliti akan mengukur dengan skala ordinal yang dialihkan kedalam bentuk angka-angka penilaian, yaitu: 1, 2, 3, 4 dimana dalam hal ini dimaksudkan:

Nilai 1 berarti Kurang Baik

Nilai 2 berarti Cukup Baik

Nilai 3 berarti Baik

Nilai 4 berarti Sangat Baik

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah peneliti ajukan sebelumnya maka dalam pengujian dipergunakan rumus-rumus sebagai berikut (Sidney Siegel, 1986: 264):

- 1. Koefisien Korelasi Rank Kendall
- 2. Koefisien Konkordansi Kendall (W)
- 3. Koefisien Determinasi

BAB II

ISI

A. HASIL PENELITIAN

1. Variabel Implementasi UU No. 22 Tahun 2009

Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan siswa SMAN 1 Boyolali termasuk dalam kategori berhasil. Dalam hal ini, para siswa SMAN 1 Boyolali cukup tertib dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain menggunakan perlengkapan yang diwajibkan dalam berkendara mereka juga cukup tertib dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Selain itu, tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas juga jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena populasi penduduknya yang tidak terlalu padat yang berdampak terhadap intensitas kegiatan lalu lintas yang tidak terlalu ramai. Untuk keamanan dalam berkendaranya juga cukup terjamin, sangat jarang terjadi kasus kejahatan lalu lintas di kalangan SMAN 1 Boyolali. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang belum baik dan masih memerlukan perbaikan. Keadaan jalan yang cukup memprihatinkan, banyak terdapatnya kerusakan jalan akan berpengaruh buruk terhadap kegiatan lalu lintas. Terutama di daerah pinggiran yang disebutkan oleh para responden masih banyak terdapat kerusakan, baik itu jalan yang bergelombang maupun berlubang. Selain itu, salah satu hal yang masih perlu diperhatikan untuk diperbaiki adalah kualitas kendaraan umum yang dianggap kurang layak oleh mayoritas responden. Banyak kendaraan umum yang sudah tidak layak jalan tetapi masih tetap beroperasi.

2. Variabel Komunikasi

Komunikasi dari aparat polisi terhadap para siswa SMAN 1 Boyolali termasuk dalam kategori baik. Ada kerjasama yang baik dilingkungan SMAN 1 Boyolali serta adanya upaya-upaya lain dari aparat polisi untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan-bantuan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, para siswa juga cukup tertarik terhadap pengetahuan tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini menandakan bahwa ada respon yang positif dari para siswa dalam implementasi kebijakan tersebut. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh aparat polisi.

Disini diketahui bahwa masih banyak masyarakat, khususnya siswa SMAN 1 Boyolali yang tidak paham akan isi maupun tujuan dari UU No. 22 Tahun 2009. selain itu, masih banyak juga masyarakat yang memiliki image yang buruk terhadap aparat polisi sehingga cenderung menimbulkan rasa kurang percaya diantaranya. Akan tetapi, ternyata ada banyak siswa yang sunguh tertarik akan pengetahuan tentang UU No. 22 Tahun 2009, hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh aparat polisi untuk dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.

3. Variabel Sikap

Sikap dari aparat polisi terhadap para siswa SMAN 1 Boyolali termasuk dalam kategori baik. Di sini dikatakan bahwa para aparat polisi bersikap ramah dan cukup disiplin dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga bertanggung jawab serta peduli terhadap tingkat ketertiban lalu lintas. Selain itu, para aparat

polisi cukup terbuka dalam menerima masukan-masukan, baik saran, kritik maupun pertanyaan dari masyarakat.

Akan tetapi masih ada beberapa sikap polisi yang masih perlu untuk diperbaiki agar mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat, diantaranya adalah tindak kekerasan yang dilakukan serta praktek tindak KKN. Hal-hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat akan kompetensi dari seorang aparat polisi.

B. ANALISIS HUBUNGAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

1. Hubungan Antara Variabel Komunikasi (X1) dengan Variabel Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y)

Adanya penerimaan terhadap hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara komunikasi (X1) terhadap implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y) di SMAN 1 Boyolali dengan koefisien korelasi sebesar 0,558. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel komunikasi dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada kecenderungan hubungan positif dan signifikan antara komunikasi dan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dapat diterima dengan besar pengaruh antara komunikasi dan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 sebesar 31%. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin baik komunikasi, maka akan semakin berhasil pula implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan siswa SMAN 1 Boyolali.

2. Hubungan Antara Variabel Sikap (X2) dengan Variabel Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y)

Adanya penerimaan terhadap hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara sikap (X2) terhadap implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y) di kalangan pelajar SMAN 1 Boyolali dengan koefisien korelasi sebesar 0,592. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel sikap dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada kecenderungan hubungan positif dan signifikan antara sikap dan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dapat diterima dengan besar pengaruh antara sikap dan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 sebesar 29%. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap dari pelaksana kebijakan, maka akan semakin berhasil pula implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan siswa SMAN 1 Boyolai.

3. Hubungan Antara Variabel Komunikasi (X1) dan Variabel Sikap (X2) dengan Variabel Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y)

Adanya penerimaan terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemampuan komunikasi (X1) dan sikap (X2) dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y) di kalangan SMAN 1 Boyolali. Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian dihitung dengan menggunakan teknik Konkordasi Rank Kendall diperoleh hasil Chi-Square = 23,579. Dengan demikian dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa antara komunikasi (X1) dan sikap (X2) dengan

implementasi kebijakan (Y) ada korelasi positif dan sangat signifikan, dengan demikian hipotesis dapat diterima.

Sumbangan variabel komunikasi (X1) dan sikap (X2) dalam hubungan dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y) di kalangan pelajar SMAN 1 Boyolali diketahui dari harga koefisien determinasi sebesar 19% dipengaruhi oleh variabel kemampuan komunikasi (X1) dan variabel sikap (X2). Sedangkan sisanya sebesar 81% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kemampuan SDM dan komunikasi.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil di atas, maka diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah atau penyempurnaan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan SMAN 1 Boyolali, antara lain :

- Variabel komunikasi dan sikap implementor terhadap implementasi UU No.
 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 - a. Hasil dari variabel komunikasi dinilai baik. Akan tetapi, masih ada yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan kebijakan UU No. 22 Tahun 2009 selanjutnya agar dapat terlaksana lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan komunikasi pelaksana dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009 antara lain, melalui:
 - Memperbanyak frekuensi sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pelajar dan masyarakat pada umumnya. Agar kesadaran tertib berlalu lintas semakin tinggi dan tidak terjadi ketidaksepahaman antara pelaksana kebijakan/aparat kepolisian dengan masyarakat.
 - Lebih mempererat jalinan hubungan kerja sama yang baik antara aparat polisi dengan masyarakat di sekitarnya guna membangun rasa kekeluargaan serta menghilangkan rasa ketidakpercayaan.
 - b. Hasil dari variabel sikap dinilai baik. Akan tetapi, masih ada yang perlu ditingkatkan lagi untuk pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 selanjutnya agar dapat terlaksana lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu mendapatkan

perhatian dalam rangka meningkatkan sikap pelaksana terhadap UU No. 22 Tahun 2009 antara lain, melalui :

- Bersikap lebih ramah kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan untuk lebih memperarat jalinan komunikasi
- Meningkatkan pengawasan terhadap tindak pelanggaran lalu lintas dengan secara continue mengadakan operasi ketertiban lalu lintas serta menindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar implementasi undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak diremehkan oleh masyarakat
- Menindak tegas kepada para oknum-oknum polisi yang telah melakukan pelanggaran, khususnya praktek KKN yang semakin lama dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat.
- 2. Hubungan antara variabel komunikasi dengan implementasi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Ada kecenderungan hubungan positif dan signifikan antara komunikasi dan implementasi UU No. 22 Tahun 2009. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin baik komunikasi, maka akan semakin berhasil pula implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan siswa SMAN 1 Boyolali. Oleh karena itu, diharapkan aparat kepolisian dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat, khususnya siswa SMAN 1 Boyolali
- Hubungan antara variabel komunikasi dengan implementasi UU No. 22 tahun
 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Ada kecenderungan hubungan
 positif dan signifikan antara sikap dan implementasi UU No. 22 Tahun 2009.

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap implementor, maka akan semakin berhasil pula implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan siswa SMAN 1 Boyolali. Oleh karena itu, diharapkan aparat kepolisian bisa bersikap dengan professional dalam hubungannya dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009.

4. Hubungan antara variabel komunikasi dan sikap dengan implementasi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Dari hasil di atas, variabel komunikasi dan variabel sikap mengalami penurunan pengaruh saat diuji secara bersamaan. Ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya akan lebih baik untuk tidak mencampur-adukkan kepentingan antar variabel tersebut demi keberhasilan implementasi UU No. 22 Tahun 2009. Dengan kata lain, walaupun aparat kepolisian dituntut untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat tetapi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai profesionalitas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moenir, A S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Zulkarimein. 1990. *Prinsip-prinsip Komunikasi Untuk Penyuluhan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oemar, Hamalik. 1993. *Psikologi Manajemen Penuntun Bagi Pemimp*in. Bandung: Trigenda Karya.
- Panuju, Redi. 2000. Komunikasi Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karjadi, M. 1976. *Perundang-undangan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia*. Bogor: Politeia.
- Purwanto, Djoko. 1997. Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga.
- Robbins, Stephen P. 2005. Manajemen. Jakarta: PT Indeks.
- Siegel, Sidney. 1986. *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi: Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, dan Niaga.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wexly, Kenneth N & Gary A. Yuki. 2003. *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*. Jakarta: PT.Rineka.

Winardi, J. 2004. Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenada Media.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1992 (UU No. 14 Tahun 1992). 1992. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Undang - undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (UU No. 22 Tahun 2009). 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

Info Lantas, 14 April 2010

Solopos, 4 Desember 2010

Suara Merdeka, 19 Oktober 2009

http://getsmart44.wordpress.com/2009/11/28/lima-tanda-komunikasi-efektif/